

Diduga Terjadi Rekayasa Proses Lelang, Ketua ULP Propinsi Banten Alergi Wartawan



Journalist: **andang**, Tanggal: *18 Jul 2019*

Serang, - Kepala Bagian (Kabag) Pengendalian dan Pembangunan, sekaligus Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi Banten, berinisial 'AJ' ditenggarai alergi terhadap wartawan.

Hal tersebut diketahui setelah indonesiasatu.co.id mendatangi Kantor ULP/Pengendalian Bangunan yang berada dilantai 5 dan 8 Gedung SKPD Terpadu Komplek Perkantoran KP3B Propinsi Banten, yang bersangkutan enggan menemui, bahkan terkesan mengabaikan kedatangan wartawan yang hendak konfirmasi seputar permasalahan dugaan rekayasa dokumen pemenang lelang/tender pada kegiatan peningkatan kualitas drainase lingkungan Kelurahan Juhut Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang, Kamis (18/7/2019).

Padahal kedatangan wartawan ingin mendapatkan keterangan perihal teknis proses lelang, yang diduga seperti yang dikatakan seorang pengusaha asal Pandeglang, berinisial 'N' mensinyalir perusahaan pemenang lelang pada kegiatan peningkatan kualitas drainase berlokasi di Kelurahan Juhut Pandeglang diduga tidak memiliki rekening giro, sebagai syarat mutlak kelengkapan persyaratan lelang sesuai yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) point enam : Rekening koran satu bulan terakhir minimal 15 % dari nilai

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan dikuatkan dengan surat pernyataan kebenaran dokumen yang dibubuhi tanda tangan oleh direktur peserta lelang.

Entah kenapa atau ada apa ? AJ sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, malah sebaliknya kepada wartawan saja dirinya enggan untuk menemui.

Ketika ditanyakan kepada petugas jaga dan resepsionis, apa alasan AJ tidak bisa menemui wartawan ? Menurut Endang salah satu petugas jaga di ruang Dalbang mengaku kalau AJ tengah sibuk lantaran pekerjaan yang menumpuk. Sehingga beliau kata Endang tidak dapat diganggu.

Ketua ULP, AJ tidak bisa ditemui, indonesiasatu.co.id pun mencoba mencari keterangan dari kelompok kerja(Pokja) ULP. Keterangan pun didapat dari Ketua Pokja, Entus yang menjelaskan kalau permasalahan muncul lantaran rekening giro perusahaan pemenang diduga kosong, menurutnya hal tersebut sudah dikonfirmasi pihak kelompok kerja (Pokja), kepada Bank Banten pada tanggal 12 Juli 2019.

"Soal rekening koran kami pihak pokja sudah konfirmasi ke Bank Banten Cabang Serang dan pihak bank mengaku kalau uang yang ada dalam rekening perusahaan tersebut jelas ada senilai yang dipersyaratkan yakni 15 % dari nilai HPS. Jadi kami yakini itu benar. Jika hal itu tidak benar, maka kami pun menyalahkan pihak Bank Banten atas keterangannya kepada kami tersebut", tutup Entus (dhank)

Sumber:

<http://www.wartasulsel.com/news/detail/>

diduga_terjadi_rekayasa_proses_lelang_2c_ketua_ulp_propinsi_banten_alergi_wartawan